



ANGKRINGAN JOGJA



TAKE OFF...!!!!

Begitulah kutipan “tajuk” warta BPK Edisi Januari 2014. Tahun ini merupakan tahun tinggal landas yang sangat menentukan arah masa depan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Selama beberapa tahun yang lalu, semua elemen telah bahu-membahu mempersiapkan “landas pacu” berbagai program seperti e-audit, pusat data, dan reformasi birokrasi. Tahun ini, bersama-sama kita akan memacu “pesawat” BPK ini di atas landasan tersebut. Sukses atau tidaknya “BPK Air” terbang tinggi dimulai pada saat ini. So, semangat sinergi bersama harus terus ditumbuhkan kembangkan. Semangat kebersamaan akan menyegarkan daun yang mulai layu..... Semangat kebersamaan akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menerjang dan membelah tebalnya awan.

Akhirnya, selamat menikmati berbagai sajian menu “angkringan”. Semoga sajian kami, akan memberi kontribusi demi suksesnya “take off” “BPK Air” tahun ini!!!!

PENANDATANGANAN MoU BPK - BPD DIY

Wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah



Rabu (26 Maret 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-D.I.Yogyakarta (DIY) secara *on-line* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY, **Sunarto**, Gubernur DIY, **Hamengku Buwono X**, dan Direktur Utama BPD DIY, **Supriyatno** serta para Bupati dan Walikota se-DIY. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK, **Hadi Poernomo**, Anggota II BPK, **Sapto Amal Damandari**, serta para pejabat di lingkungan BPK, pemerintah daerah (pemda), dan BPD DIY.

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan akses data transaksi rekening pemda dimaksud secara *on-line* pada BPD dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

Kesepakatan bersama tersebut merupakan salah satu implementasi e-

audit BPK pada Pemda. **Hadi Poernomo** menegaskan bahwa dengan akses *online* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari e-audit ini, pencegahan KKN dapat dilakukan secara sistemik karena pengelola keuangan negara “**terpaksa patuh**” secara sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas.

Selain peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK, sistem *on-line* e-audit juga akan meningkatkan penerimaan negara/daerah pada pemda tersebut dan menciptakan “**e-audit financial tracking**” yang akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-D.I.Y serta BPD DIY. Manfaat lainnya bagi pemda antara lain mencegah anomali/penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda dimaksud. Bagi BPD, akses *on-line* dapat digunakan untuk mendorong pengembangan *Cash Management System* (CMS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pemda dimaksud.

Menu Angkringan

MoU BPK-BPD DIY.....	1
Penyerahan LKPD Unaudited.....	2
Penyerahan 3 LHP	2
Sosialisasi akses Data Rekening Pemda....	3
Sosialisasi, Ziarah.....	3
Keterangan Ahli, HUT Ke-67 BPK	4
Jeprat Angkringan.....	4/5
Family Gathering.....	6
Tasyakuran dan Upacara.....	6
Pemeriksaan Pendahuluan....	7
Kilas Media, Erupsi Kelud, Renungan.....	8

PENYERAHAN LKPD (*Unaudited*) TAHUN ANGGARAN 2013



Yogyakarta (Selasa, 25/3) Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se-wilayah Yogyakarta secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 (TA 2013) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY). "Penyerahan LKPD TA 2013 ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 dimana LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir." demikian Kepala Perwakilan, **Sunarto** mengawali sambutannya.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan LKPD TA 2013 tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang", ucap Sunarto melanjutkan sambutannya.



Selain sebagai upaya pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, acara ini juga merupakan bentuk ikrar bahwa laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah siap dinilai (diperiksa) oleh BPK. "BPK DIY akan segera memeriksa LKPD tersebut, sehingga diharapkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD dapat

disampaikan kepada DPRD 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah ini." demikian harapan Sunarto merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Penyerahan LKPD TA 2013 yang dilaksanakan di Auditorium BPK DIY ini dihadiri oleh Walikota, Para Bupati di wilayah Yogyakarta, serta Sekretaris Daerah Provinsi DIY beserta perangkatnya. Bupati Kulonprogo, **Hasto Wardoyo** dalam sambutannya sebagai wakil Pemerintah Daerah berharap agar kinerja pemerintah provinsi/kota/kabupaten lebih baik dari tahun sebelumnya. "Jika pada tahun anggaran 2012 baru empat pemerintah daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semoga untuk TA 2013 semuanya bisa WTP." demikian harapnya.



BPK DIY Serahkan 3 LHP



Yogyakarta, (Jumat, 17/1) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPK DIY) menyerahkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pertama, penyerahan LHP atas Operasional Bank pada Bank Dagang Gunungkidul Tahun 2012-2013. Penyerahan LHP dilakukan

langsung oleh Kepala Perwakilan, **Sunarto** dan diterima oleh Ketua DPRD Gunungkidul, **Ratno Pinto** dan Bupati Gunungkidul, **Badingah**. Pada hari yang



sama, BPK DIY juga melakukan penyerahan LHP atas PD Tarumartani di Ruang Rapat Sekretaris

Daerah Provinsi DIY. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat BPK DIY, **Nugroho Heru Wibowo** dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, **Tutiék M Widyo** dan Sekretaris Daerah Provinsi DIY, **Ichsanuri**. Selanjutnya di hari yang sama, Kepala Sub Auditorat BPK DIY, juga menyerahkan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul. Acara dilaksanakan di ruang Bupati dan dihadiri oleh DPRD, Bupati beserta jajarannya.



BPK Adakan Sosialisasi Akses Data Rekening di BPD DIY



Yogyakarta (Senin,27/1) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPK DIY) mengadakan sosialisasi akses data rekening entitas pada Bank BPD DIY. Sosialisasi yang dilaksanakan di Auditorium R. Soerasno ini merupakan langkah awal untuk pelaksanaan agenda penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-D.I. Yogyakarta secara *on-line* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) D.I. Yogyakarta dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

"Kami berharap acara ini akan

semakin meningkatkan sinergi antara BPK DIY, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, dan BPD DIY dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel." Demikian ungkap Kepala Perwakilan, **Sunarto** dalam sambutannya.



Sosialisasi ini dimoderatori Kasubbag SDM, Hukum, dan Humas, **Sandra Nursantie** dan menghadirkan narasumber dari Biro Teknologi Informasi (Biro TI) dan Ditama Binbangkum, serta dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-DIY juga perwakilan dari Bank BPD DIY.

Sosialisasi Mekanisme Tagihan



Yogyakarta (Kamis,23/1) BPK Perwakilan DIY mengadakan sosialisasi mekanisme penyelesaian tagihan tahun 2014. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, **Sunarto**. Narasumber sosialisasi ini adalah Kasubbag Keuangan, **Bustanul Arifin** dan Staf Sub Bagian Keuangan, **Haryanto**.

"Acara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara Subbagian Keuangan dan unit kerja dalam proses penyelesaian tagihan." demikian ujar **Bustanul Arifin** menegaskan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kesamaan persepsi tersebut penting artinya demi tercapainya tujuan Subbagian keuangan untuk memberikan pelayanan prima kepada setiap unit kerja.

Keluarga Besar BPK RI Ziarah ke Makam Sultan HB IX



Yogyakarta (Kamis 9/1) Keluarga Besar BPK RI melakukan ziarah ke makam Sri Sultan HB IX di Makam Raja Mataram Imogiri, Bantul. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 67 BPK RI. Rombongan BPK RI dipimpin Anggota II BPK RI, **Sapto Amal Damandari** dan diterima oleh **Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Jayaningrat** yang merupakan wakil dari keluarga Keraton

Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam sambutannya, **Sapto Amal Damandari** menyampaikan bahwa Alm. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikenal sebagai tokoh nasional mulai dari zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai dengan zaman pemerintahan Orde Baru. Berbagai jabatan dalam pemerintahan pernah disandangnya, mulai dari Kepala Daerah, berbagai jabatan menteri, dan pada puncaknya, menjadi Wakil Presiden RI ke-2 periode bulan maret 1973 s.d. bulan maret 1978. Diantara berbagai jabatan yang pernah disandang Alm. tersebut, beliau pernah menjabat sebagai Ketua BPK periode November 1963 s.d. Agustus 1964.

"Walaupun hanya menjabat sebagai ketua BPK kurang dari satu tahun, telah banyak sumbangsiah yang



telah diberikan Alm. untuk kemajuan dan perkembangan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan atas keuangan negara sehingga kemajuan dan perkembangan tersebut masih dapat kita rasakan hingga saat ini." Demikian tegas Sapto Amal Damandari mengakhiri sambutannya. Acara dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama di makam Sri Sultan HB IX.



KETERANGAN AHLI

AUDITOR BPK DIY BERI KETERANGAN AHLI KASUS BUS TRANS JOGJA



Yogyakarta (Selasa, 18/2) Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY), **Dedi Suprianto** memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta. **Dedi Suprianto** yang merupakan Ketua Tim Senior di BPK DIY memberikan keterangan

ahli perkara dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Bus Trans Jogja oleh PT Jogja Tugu Trans (PT JTT).

Dugaan penyimpangan dana BOK tersebut terjadi pada kurun tahun anggaran 2008–2009 dimana berdasar hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPK DIY, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp413 juta. “*Hasil perhitungan kerugian negara yang kami lakukan menunjukkan bahwa penyimpangan dana BOK Bus Trans Jogja tersebut telah merugikan negara sebesar Rp413 juta.*” demikian tegas **Dedi Suprianto**.

AUDITOR BPK DIY BERI KETERANGAN AHLI KASUS TEMBAKAU VIRGINIA



Yogyakarta (Kamis, 20/2) Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY), **Tommy Tampubolon** memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta. **Tommy Tampubolon** yang merupakan Ketua Tim Junior di BPK DIY memberikan keterangan ahli

perkara dugaan penyimpangan belanja hibah tembakau virginia pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul

Kasus tersebut bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DIY atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009. “*Belanja hibah yang dicairkan pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp570 juta tersebut tidak digunakan untuk penanaman tembakau virginia, namun justru digunakan untuk membayar utang pinjaman di Bank Pasar Bantul.*” demikian ucap Tommy Tampubolon menegaskan pada Majelis Hakim.

KATA MUTIARA:

“Dalam kebenaran dan keadilan, yang paling utama bukanlah besar atau kecilnya nilai, namun perlakuan sama terhadap semua orang” (Albert Einstein)

HUT KE-67 BPK



Kang ayo kang ngabdi bareng neng BPK..., Yu ayo yu....ngabdi bareng karo aku... Sing pemrikso...kudu eling sing Kuoso., Sing ra mrikso...ugo abdine negoro.... Mangan nanas jo dicampur karo beras..., jo do melas kudu jogo integritas... Mangan roti...diolesi selei blueberi..., dadi siji jogo prinsip independensi... Mangan bawal rasah tekan pantai krakal...!!!! Jo do nakal...kabeh kudu profesional!!!



Meriah...kompak dan penuh makna!!!

Itulah ungkapan yang pas menggambarkan suasana peringatan HUT ke-67 BPK di Perwakilan Provinsi DIY. Berbagai kegiatan diselenggarakan mulai tanggal 3-18 Januari 2014. Rangkaian kegiatan peringatan HUT Ke 67 BPK dibuka oleh Kepala sekretariat, **Hardinah**. “Selamat bertanding....dan jaga selalu sportivitas....karena itu menjadi ciri pribadi pegawai BPK yang berintegritas..” demikian pesan Kepala Sekretariat dalam sambutannya. Secara simbolis, **Hardinah** menyerahkan bola voli kepada Ketua Panitia HUT 67, Bustanul Arifin sebagai tanda dimulainya rangkaian acara HUT 67 di BPK DIY.

Berbagai acara olahraga dilaksanakan, mulai dari bola voli, catur, tenis meja, tenis lapangan, serta sepeda santai. Selain itu rangkaian acara semakin meriah dengan lomba paduan suara dan karaoke di ruang auditorium. Tak sekedar acara yang bernuansa kemeriahan, namun sebagai wujud kepedualian sosial BPK DIY juga menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dengan donor darah dan menyumbang panti asuhan “atap langit” di Yogyakarta. Berbagai liputan acara tersaji di *Jepret Angkringan*



JEPRET ANGKRINGAN



Bola Volley, 3/1/2014



Tennis Lapangan, 3/1/2014



Donor Darah, 8/1/2014



Tennis Meja, 13/1/2014



Catur 13/1/2014



Paduan Suara 16/1/2014



Senam 17/1/2014



Sepeda Santaí, 17/1/2014

FAMILY GATHERING KELUARGA BESAR BPK PERWAKILAN DIY



BPK...!!!! Jaya. BPK!!!! Jaya.
Jogja!!!! Istimewa

Demikianlah teriakan penuh inspirasi yang memecah suasana hening pagi di Bumi Karang Pramuka Kaliurang. Walaupun pagi itu hujan rintik mulai turun, namun tak menyurutkan langkah para “abdi negara” BPK Jogja untuk berbaur menjadi satu...merapatkan barisan...menghilangkan batas-batas posisi dan jabatan....berkumpul dalam meriahnya suasana kebersamaan dalam acara Family Gathering BPK Perwakilan Provinsi DIY 2014. Kegiatan yang dilaksanakan Sabtu, 18 Januari 2014 ini diawali dengan Laporan Ketua Panitia HUT Ke-67, **Bustanul Arifin** dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Per-

wakilan.

“*Semoga acara ini semakin meningkatkan kekompakan dan semangat Ke-BPK-an keluarga besar BPK DIY sehingga kinerja kita semakin optimal*” demikian harap Kepala Perwakilan, Sunarto dalam sambu-



**Kasubbag SDM, Hukum, & Humas bersama Kasubbag Keuangan menerima hadiah sebagai Juara I Lomba Paduan Suara*

tannya. Acara dilanjutkan dengan berbagai *games* dan lomba mewarnai untuk anak-anak. Puncak acara ditandai dengan pembagian hadiah perlombaan dan pertandingan yang dilaksanakan dalam memeriahkan HUT ke-67 BPK RI. Selain itu pembagian ratusan doorprize juga semakin menambah meriah acara ini. Jayalah BPK....Sejahteralah Indonesia!!!

TASYAKURAN HUT KE 67 BPK RI

Selasa (28/1/2014) BPK Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY)



melaksanakan acara tasyakuran HUT Ke-67 setelah melaksanakan upacara bendera HUT ke-67. Acara dilaksanakan di ruang auditorium Gedung R Soerasno. Selain sebagai wujud rasa syukur karena usia lembaga telah memasuki 67 tahun, acara ini juga dimanfaatkan keluarga besar BPK DIY untuk menjalin silaturahmi dengan para pensi-

unan yang tergabung dalam Persatuan Paska Karya (PEPASKA). “*Terimakasih kepada keluarga besar BPK DIY dan kami berharap BPK akan semakin independen, berintegritas dan profesional, sehingga pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel akan segera terwujud.*” Demikian ucap **Ndung Suprayitno**, Ketua PEPASKA.

Puncak acara ditandai dengan *teleconference* dengan Ketua BPK, **Hadi Purnomo** dan pengumuman hasil penilaian Satker Terbaik, dimana BPK Perwakilan Provinsi DIY berhasil mempertahankan prestasi tahun lalu dengan meraih Satker Terbaik III. “*BPK Yogyakarta... Istimewa dan semoga tetap istimewa!!!*” Demikian tutup **Hadi Purnomo**.

UPACARA HUT KE-67 BPK RI



Selasa (28 Januari 2014) seluruh pegawai BPK RI dari Perwakilan Nangroe Aceh Darussalam sampai Perwakilan Papua menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke 67 BPK, tak terkecuali di Perwakilan Provinsi DIY. Sehubungan hujan yang mengguyur, maka upacara dilaksanakan di ruang auditorium perwakilan. Dengan khidmat seluruh pegawai mengikuti acara demi acara yang dipimpin oleh **Krisnanto Adi Nugroho** dan Kepala Perwakilan, **Sunarto** sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, **Sunarto** membacakan Pidato Ketua BPK mengenai keberhasilan BPK dalam menyelenggarakan kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, Ketua BPK berpesan kepada seluruh jajaran BPK RI untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme. “BPK harus memaksimalkan kemampuannya melakukan monitoring dan pemeriksaan melalui pusat data BPK dan e-audit sehingga BPK ada di mana-mana, dan di mana-mana ada BPK”, ujar **Sunarto** saat membacakan Pidato Ketua BPK.

“Dirgahayu BPK RI ke-67, Disini ada BPK, Disana ada BPK, Dimana-mana ada BPK, BPK Satu, BPK JAYA....”



*Kepala Perwakilan menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X kepada **Nurochman***

Sudah menjadi keniscayaan bahwa sebagai pegawai di BPK seyogyanya kita semua akan menjadi corong dan perpanjangan tangan dari institusi ini. Mungkin terasa "hiperbolik", namun itulah kenyataannya di lapangan. Seringkali tetangga atau bahkan keluarga kita akan menanyakan ke kita tatkala ada pemberitaan terkait BPK. Tak jarang penulis "gelagepan" ketika ada materi pertanyaan sederhana terkait tugas dan fungsi BPK. Ambil contoh saja, pertanyaan seputar opini atas Laporan Keuangan, **standarnya apa? Sudah WTP kok tetap ada korupsi?** Menjadi hal mudah untuk memberikan jawaban jika kebetulan kita adalah pemeriksa, ditempatkan di unit teknis, serta berlatar belakang pendidikan akuntansi. Namun tidak jarang dari kita, adalah tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Tentu saja akan tidak elok kalo kita menjawab "tidak tahu" dengan berbagai alasan pembenaran, karena ketika "pegawai BPK" sudah dilabelkan orang lain pada diri kita maka tidak ada lagi kotak-kotak sebagai pegawai penunjang, pegawai pendukung, pegawai non teknis atau yang lainnya. So, mulai edisi kali ini, Angkringan akan mencoba menyajikan menu khas dalam kolom BPK Kita. Rubrik ini akan diisi dengan berbagai pertanyaan sederhana tentang BPK. Tema pertama kita adalah "**Pemeriksaan Pendahuluan Vs Pemeriksaan Interim**"?

Awal bulan Pebruari, Tim Pemeriksa BPK Perwakilan DIY atas LKPD Tahun Anggaran 2013 mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 25 hari. Penulis pernah ditanya seorang teman yang notebene sesama pegawai BPK, apa itu pemeriksaan pendahuluan? Apa itu pemeriksaan interim? Apakah keduanya sama atau berbeda?

Hasil penelusuran dalam Buku Panduan Pemeriksaan LKPD Edisi 2013 disimpulkan bahwa untuk memahami pemeriksaan interim dan pemeriksaan pendahuluan dapat ditinjau dari beberapa poin

singkatnya waktu Pemeriksaan LKPD sesuai ketentuan perundang-undangan (2 bulan sejak LKPD diterima dari Pemda), maka tujuan dan lingkup Pe-



Poin	Pemeriksaan Interim	Pemeriksaan Pendahuluan
Definisi	pemeriksaan yang dilakukan sebelum berakhirnya tanggal Neraca (31 Desember)	pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemerintah daerah menyampaikan LKPD kepada BPK
Waktu	Umumnya dilaksanakan pada bulan Oktober sd Desember	Umumnya dilaksanakan pada bulan Januari sd April
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kesimpulan hasil reviu atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. • Pengujian kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atas transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung sampai dengan saat pemeriksaan interim. • Perolehan data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan terinci LKPD, antara lain meliputi, tapi tidak terbatas pada, pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan penilaian risiko (risk assesment). 	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai efektivitas sistem pengendalian intern (SPI); • Menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan; • Memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.

meriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Interim dapat saja sama. Akan tetapi apabila melihat sekuen pemeriksaan di mana Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Rinci waktunya berdekatan dibandingkan waktu antara Pemeriksaan Interim dan Pemeriksaan Rinci, maka Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Interim dapat berbeda tujuan dan lingkupnya. Salah satu perbedaan antara Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Interim adalah di dalam Pemeriksaan Interim, pemeriksa melakukan pengujian substantif untuk "*menyicil pekerjaan*". Sementara itu dalam Pemeriksaan Pendahuluan, pengujian substantif umumnya tidak dilakukan.

Dalam praktik di BPK, Perwakilan yang tidak melakukan Pemeriksaan Interim, umumnya melakukan PDTT Belanja di Triwulan IV yang hasilnya dapat digunakan dalam Pemeriksaan LKPD. Inilah salah satu alasan praktis mengapa Pemeriksaan Pendahuluan tidak dianjurkan lagi untuk melakukan pengujian substantif.

**) Analisis persamaan dan perbedaan antara Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Interim tidak dimaksudkan untuk mendefinisikan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dan hanya digunakan untuk kepentingan praktik pemeriksaan di BPK khususnya di Perwakilan.*

yang disajikan dalam tabel berikut:

Selain beberapa perbedaan di atas, dalam mempertimbangkan strategi pemeriksaan yang ada yaitu

ERUPSI KELUD



Kamis, 13 Februari 2014 Gunung Kelud Meletus. PVMBG menyatakan letusan tahun ini sangat luar biasa. Ketinggian lontaran material ke angkasa hingga radius 17 kilometer menjadi bukti besarnya daya ledak magma Gunung Kelud. Tak hanya daya ledak ke angkasa yang fenomenal, lontaran pasir dan debu vulkanik yang menyebar hingga ke kawasan Jawa Barat menjadi ukuran kedahsyatan letusan ini. Tak terkecuali di Perwakilan DIY juga ikut terdampak debu letusan ini. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari abu Kelud, Senin, 24/2/2014 Keluarga Besar Perwakilan DIY bahu-membahu “gugur gunung” membersihkan lingkungan Kantor Perwakilan.



RENUNGAN....

AWAL TAHUN

Tahun 2013 telah meninggalkan kita. Ada banyak hal yang harus kita evaluasi mengenai pencapaian target tahun kemarin.

yang targetnya tercapai; Alhamdulillah saatnya menyusun target baru di tahun ini. Bagi yang targetnya belum tercapai; saatnya evaluasi diri, supaya target berikutnya tidak meleset.

Mudah-mudahan sedikit renungan ini bisa menambah semangat baru, untuk menyongsong target baru di tahun 2014

Jangan menunggu bahagia, baru tersenyum.

Tapi tersenyumlah, maka kamu kian bahagia

Jangan menunggu kaya, baru mau beramal.

Tapi beramal lah, maka kamu semakin kaya

Jangan menunggu termotivasi, baru bergerak.

Tapi bergeraklah, maka kamu akan termotivasi

Jangan menunggu dipedulikan orang baru anda peduli,

Tapi pedulilah dengan orang lain! maka anda pasti akan dipedulikan...

Jangan menunggu orang memahami kamu, baru kita memahami dia.

Tapi pahamiilah orang itu, maka orang itu paham dengan kamu

Jangan menunggu sukses, baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka bertambah kesuksesanmu

Jangan menunggu bisa, baru melakukan. Tapi lakukanlah! Kamu pasti bisa!

Para Pecundang selalu menunggu Bukti dan Para Pemenang Selalu Menjadi Bukti

Seribu kata akan dikalahkan Satu Aksi Nyata!

KILAS MEDIA

Bernas, 03/01/2014

“ Tahun 2013, 7M Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bantul tak terserap ”



Desa belum bisa bikin SPJ fiktif kali.....! xixixi

Kedaulatan Rakyat, 09/01/2014

“ Bupati baru tahu penyimpangan dana hibah tembakau Virginia dari temuan BPK ”



Hmmm.....untung ada BPK, kalo tidak????

Tribun Jogja, 01/03/2014

“ Jumlah 33 auditor BPK DIY akan kewalahan kontrol Dana Desa ”

TOSS...Tenang..Optimis...Semangat dan



Harian Jogja, 19/03/2014

“ Ketua DPRD Kota Jogja mengakui ikut menentukan titik pembangunan PERGOLA yang diduga terindikasi korupsi ”

Semestinya saling bersinergi dalam kebaikan!!!

DARI KITA UNTUK KITA!!

Redaksi menerima tulisan/artikel dari segenap pembaca. Bagi setiap artikel yang dimuat disediakan bingkisan menarik.

Silahkan kirimkan karya anda ke:
Tim Publikasi Subbag SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan DIY;
Email : humasdiy@gmail.com



Pengarah : Sunarto, Penanggungjawab: Hardinah,
Pemimpin redaksi: Sandra Nursantie,SH
Tim Redaksi: Wahyu Nurhayati, Nurochman, Topan Santoso, , Wahyu Bagus D

Alamat Redaksi :

Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta.....www.yogyakarta.bpk.go.id.....humasdiy@gmail.com